

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (PERUBAHAN)**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014-2019**

- Instansi** : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur
- Tujuan** : Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan
- Tugas** : Membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi di bidang perencanaan.
- Fungsi** :
1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan;
  2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan;
  3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan;
  4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan;
  5. Pelaksanaan administrasi badan di bidang perencanaan; dan
  6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR  
TAHUN 2018-2019**

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1. Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yg berkualitas serta tersedianya data/informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu	1. Prosentase Indikator Program Pembangunan Daerah dengan Tingkat Capaian Hasil (Outcome) Minimal 75 % .	$\frac{\text{Jumlah Indikator Program yang mencapai 75\%}}{\text{Jumlah Indikator Program}} \times 100\%$	- evaluasi laporan SKPD - LKPJ Th-n	Bid. Pengendalian dan Evaluasi
	2. Prosentase data dan informasi perencanaan yang dibutuhkan	$\frac{\text{Data yang tersedia}}{\text{Total data yang dibutuhkan sebagaimana lampiran 1 Permendagri 54/2010}} \times 100\%$ Total data yang dibutuhkan sebagaimana lampiran 1 Permendagri 54/2010 Definisi operasional dari data sesuai lampiran 1 Permendagri 54 Tahun 2010 seluruh komponen data yang tercantum pada Permendagri No. 54 Tahun 2010. Komponen data tersebut terdiri dari 3 aspek yaitu: a. Aspek kesejahteraan masyarakat yang focus ke: komponen kesejahteraan dan pemerataan ekonomi; kesejahteraan masyarakat; dan seni budaya dan olahraga b. Aspek Pelayanan Umum yang focus ke: Layanan urusan wajib dan pilihan; c. Aspek Daya Saing Daerah yang focus ke: Kemampuan ekonomi daerah; fasilitas wilayah/infrastruktur; iklim berinvestasi; dan sumber daya	- Badan Pusat Statistik - Bank Indonesia - SKPD - Instansi Vertikal dan lembaga lainnya di Jatim	UPT Pelayanan Data Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan
2. Mekanisme perencanaan yang transparan, partisipatif dan inovatif	1. Prosentase dokumen perencanaan yang dipublikasikan	$\frac{\text{Jumlah dokumen perencanaan yang dipublikasikan}}{\text{Jumlah dokumen perencanaan yang wajib dipublikasikan}} \times 100\%$ Definisi Operasional dari Dokumen perencanaan yang dipublikasikan adalah dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang, menengah dan tahunan yang bersifat wajib untuk dipublikasikan sebagaimana UU Keterbukaan Publik	- Website Bappeda - Musrenbang RKPD - RPJMD - SIPPD	Sekretariat Sekretariat dan seluruh bidang Perencana
	2. Prosentase ketaatan terhadap tata ruang	$\frac{\text{Jumlah Ijin Pemanfaatan Ruang (IPR) yang telah diterbitkan}}{\text{Jumlah Pengajuan Ijin Pemanfaatan Ruang yang Masuk}} \times 100\%$	- RTRW - RPJMD	UPT Tata Ruang dan Geospasial